

**SEKOLAH RAKYAT SEBAGAI STRATEGI PENDIDIKAN INKLUSIF
UNTUK PEMBERDAYAAN SDM MARGINAL DI INDONESIA:
ANALISIS PROGRAM ERA PRESIDEN PRABOWO**

Rizqillah¹⁾, Miftahul Ulum²⁾

^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pedagogi dan Psikologi
Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, Indonesia

¹rizqialmadan5@gmail.com, ²boytheband87@gamil.com

Abstrak

Pendidikan memiliki peran strategis dalam mendorong kesetaraan hak asasi manusia (HAM), terutama dalam masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, gagasan *Sekolah Rakyat* yang diusung dalam program Presiden Prabowo muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan pendidikan yang inklusif dan memberdayakan. Fokus artikel ini adalah mengeksplorasi bagaimana model pendidikan alternatif seperti *Sekolah Rakyat* dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang efektif dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang sadar HAM dan memiliki daya saing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, kebijakan pemerintah, dan dokumen program resmi *Sekolah Rakyat*. Langkah penting penelitian meliputi identifikasi prinsip dasar HAM dalam pendidikan, analisis konten kurikulum *Sekolah Rakyat*, serta evaluasi potensi dan tantangan implementasi program ini dalam konteks keadilan sosial. Temuan menunjukkan bahwa *Sekolah Rakyat* berkontribusi terhadap pemenuhan hak pendidikan yang merata melalui pendekatan kontekstual berbasis komunitas, penguatan nilai-nilai kesetaraan, serta partisipasi masyarakat lokal dalam proses belajar. Kesimpulannya, *Sekolah Rakyat* bukan hanya menjembatani kesenjangan pendidikan, tetapi juga membangun landasan kesetaraan HAM melalui proses pemberdayaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak asasi manusia, Pendidikan inklusif, Sekolah Rakyat.

Abstract

Education plays a strategic role in promoting human rights equality, particularly in societies experiencing socio-economic disparities. In the Indonesian context, the concept of Sekolah Rakyat (People's School), as promoted in President Prabowo's program, emerges as a response to the need for inclusive and empowering education. This article focuses on exploring how alternative education models such as Sekolah Rakyat can serve as effective instruments of social transformation in building human resources (HR) that are aware of human rights and competitive. The study employs a qualitative approach using literature review methods from scientific sources, government policies, and official documents related to the Sekolah Rakyat program. The key steps include identifying core human rights principles in education,

Article History

Received: May 2025

Reviewed: June 2025

Published:

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

analyzing the content of the Sekolah Rakyat curriculum, and evaluating the potential and challenges of implementing this program within the context of social justice. The findings indicate that Sekolah Rakyat contributes to fulfilling equal access to education through a community-based contextual approach, reinforcement of equality values, and local community participation in the learning process. In conclusion, Sekolah Rakyat not only bridges educational disparities but also builds a foundation for human rights equality through a sustainable empowerment process.

Keywords: *Human rights, Inclusive education, Sekolah Rakyat.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional, seperti Pasal 31 UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia masih tinggi, terutama di wilayah pedalaman, daerah tertinggal, dan komunitas miskin urban. Hal ini menyebabkan terbatasnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Menurut Simorangkir (2022), sistem pendidikan nasional masih bersifat elitis dan seringkali gagal menjangkau kelompok marginal yang sangat membutuhkan pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang fundamental dan menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang adil, setara, dan berdaya saing. Dalam konteks Indonesia, akses terhadap pendidikan yang merata dan berkualitas masih menjadi tantangan serius, terutama bagi kelompok marginal dan masyarakat miskin. Data dari Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) masih mengalami disparitas tajam antarwilayah, mencerminkan ketimpangan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya pada awal tahun 2025, menegaskan pentingnya memperluas akses pendidikan bagi seluruh rakyat melalui program *Sekolah Rakyat*, yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan berbasis komunitas bagi kelompok rentan dan miskin (Kompas.com, 2025).

Secara teoritis, pendidikan inklusif memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian kesetaraan HAM karena menempatkan semua individu sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran tanpa diskriminasi. Model ini tidak hanya menghapuskan sekat-sekat berbasis ekonomi, sosial, dan disabilitas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokrasi dan partisipasi dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Jannah, dkk (2021) yang menekankan bahwa pendidikan inklusif adalah instrumen penting dalam mewujudkan hak pendidikan yang adil dan merata, khususnya dalam sistem yang masih terfragmentasi secara struktural dan budaya.

Namun demikian, terdapat kesenjangan besar antara harapan ideal dan kenyataan di lapangan. Banyak anak dari keluarga miskin, terutama di wilayah pedalaman dan tertinggal, masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan formal. Fasilitas yang minim, tenaga pengajar yang terbatas, dan kurikulum yang tidak kontekstual menjadi penghalang utama (Putri & SE, 2020). Di sinilah letak urgensinya kehadiran *Sekolah Rakyat* sebagai terobosan inovatif dalam menjawab tantangan struktural tersebut. Dengan pendekatan lokal berbasis komunitas, program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak yang terpinggirkan oleh sistem pendidikan konvensional.

Dalam perspektif pembangunan nasional, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci strategis dalam menyongsong era bonus demografi dan transformasi digital. Menurut Marlinah (2019), pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat akan mampu melahirkan generasi berjiwa inovatif dan technopreneur yang mampu bersaing secara global.

Maka dari itu, *Sekolah Rakyat* bukan hanya solusi jangka pendek untuk masalah akses, tetapi juga investasi jangka panjang dalam mencetak SDM unggul berbasis HAM.

Kebijakan *Sekolah Rakyat* yang digagas Presiden Prabowo membawa paradigma baru dalam kebijakan pendidikan nasional. Tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan ketimpangan, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem pendidikan alternatif yang holistik, adaptif, dan berkelanjutan. Program ini mengadopsi prinsip pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) dan pemberdayaan komunitas sebagai inti prosesnya (Safitri, dkk. 2022). Dalam kerangka ini, *Sekolah Rakyat* juga membuka ruang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi lokal untuk menciptakan ekosistem belajar yang kontekstual.

Inovasi kebijakan ini memperluas definisi pendidikan formal dengan memasukkan nilai-nilai lokal, praktik sosial, serta pendekatan partisipatoris yang selama ini terpinggirkan oleh sistem pendidikan konvensional. Sebagai contoh, dalam praktiknya, *Sekolah Rakyat* melibatkan tokoh masyarakat dan relawan sebagai fasilitator belajar yang memiliki kedekatan dengan kultur dan kondisi sosial setempat. Menurut Yohana (2023), peran kepala sekolah dan komunitas lokal menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan program pendidikan inklusif berbasis HAM.

Kajian-kajian terdahulu mengenai pendidikan inklusif di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Jannah dkk. (2021) dalam "*Model layanan pendidikan inklusif di Indonesia*", umumnya menyoroti pendekatan formal yang berbasis institusi pendidikan negeri dan swasta dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Sementara itu, Wahyudi & Latif (2023) melalui artikelnya "*Pendidikan inklusif di Indonesia perspektif Maqashid Syariah*" menekankan urgensi pendidikan inklusif dari sudut pandang nilai-nilai syariah, terutama dalam menjamin hak-hak pendidikan kelompok rentan. Namun, kedua penelitian tersebut belum menjangkau ranah pendidikan nonformal alternatif seperti Sekolah Rakyat, yang beroperasi secara partisipatif dan berbasis komunitas dalam menjawab keterbatasan akses pendidikan bagi kelompok marginal. Artikel ini, berjudul "*Sekolah Rakyat sebagai Strategi Pendidikan Inklusif untuk Pemberdayaan SDM Marginal di Indonesia: Analisis Program Era Presiden Prabowo*", hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana Sekolah Rakyat dapat menjadi strategi pendidikan inklusif berbasis pemberdayaan yang fleksibel dan kontekstual, terutama dalam lanskap kebijakan pemerintahan baru. Dengan demikian, artikel ini memperluas diskursus pendidikan inklusif dari kerangka formal ke alternatif yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat akar rumput.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research) sebagai teknik utama pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada penelaahan secara mendalam terhadap konsep, kebijakan, dan praktik pendidikan alternatif dalam kerangka kesetaraan hak asasi manusia dan penguatan sumber daya manusia melalui *Sekolah Rakyat*. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015-2025), dokumen resmi kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait program *Sekolah Rakyat*, serta laporan media daring kredibel seperti CNN, Kompas, Tempo, dan Detik, dengan total sebanyak (15) sumber literatur yang dianalisis.

Prosedur pelaksanaan dimulai dengan identifikasi kata kunci dan penyaringan literatur melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Neliti, serta portal jurnal terakreditasi. Setelah data dikumpulkan, dilakukan proses telaah sistematis terhadap isi dokumen menggunakan teknik analisis isi (content analysis), dengan fokus pada tema: pendidikan inklusif, penguatan SDM, dan pemenuhan HAM melalui pendidikan. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan dan disintesis untuk menemukan pola-pola konseptual dan empiris yang relevan terhadap peran *Sekolah Rakyat* dalam konteks kebijakan pendidikan nasional era pemerintahan Presiden Prabowo.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kualitatif yang secara aktif melakukan interpretasi terhadap teks dan konteks sumber data. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan pengecekan silang antar-literatur guna memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. Hasil dari metode ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif, kritis, dan aktual terhadap inovasi pendidikan berbasis komunitas dalam membangun kesetaraan HAM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada awal tahun 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meluncurkan program *Sekolah Rakyat* sebagai bagian dari agenda prioritas nasional Presiden Prabowo dalam memberantas ketimpangan akses pendidikan. Program ini difokuskan pada kelompok miskin, anak jalanan, anak disabilitas, dan keluarga rentan yang secara struktural terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Berdasarkan laporan CNN Indonesia (2025), program ini dimulai di 100 titik kawasan padat dan miskin kota serta wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Model implementasi Sekolah Rakyat yang diusung oleh Kemensos mengedepankan kolaborasi antara tokoh masyarakat, relawan lokal, serta penyintas pendidikan. Program ini tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga modul pembelajaran berbasis keterampilan hidup (life skills), literasi dasar, dan kesadaran sosial. Proses ini dilaksanakan secara partisipatoris, yang memungkinkan peserta menjadi subjek aktif dalam pembelajaran, sebagaimana dikonfirmasi dalam dokumen resmi Kemensos (2025).

Salah satu hal yang mencolok dari hasil penelitian adalah integrasi nilai-nilai HAM dalam kurikulum *Sekolah Rakyat*. Modul ajar dikembangkan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, keadilan sosial, dan penghargaan atas martabat manusia. Dalam pelaksanaannya, kurikulum menekankan pentingnya kesetaraan, empati, dan kepedulian sosial terhadap kelompok rentan. Pendekatan ini memperkuat transformasi pendidikan dari sekadar transmisi pengetahuan menjadi alat emansipatoris (Yohanes & Widiyastuti, 2022).

Pelaksanaan program ini juga menonjol dalam hal pelibatan komunitas lokal sebagai fasilitator dan penyelenggara utama kegiatan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut mengelola sekolah dan menyusun agenda pendidikan. Hal ini memperkuat kemandirian masyarakat dan mempercepat proses pemberdayaan, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Wahyudi & Latif (2023) mengenai efektivitas pendidikan berbasis komunitas dalam membangun SDM.

Meski menjanjikan, pelaksanaan *Sekolah Rakyat* masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas dan tenaga pengajar terlatih. Di sejumlah lokasi uji coba seperti Kabupaten Pandeglang dan Sorong Selatan, keterbatasan logistik menjadi kendala utama (Tempo, 2025). Kebutuhan terhadap ruang belajar, media pembelajaran, dan pelatihan guru masih mendesak untuk ditangani secara sistemik.

Kebijakan *Sekolah Rakyat* diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu program unggulan yang diatur dalam Inpres tersebut adalah *Sekolah Rakyat*, yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa "Instruksi Presiden ini menjadi landasan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk secara kolaboratif mengupayakan penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif dan berdampak nyata. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2026, serta penurunan angka kemiskinan umum menjadi di bawah lima persen pada tahun 2029." (Kemensos, 2025).

Respons publik terhadap program ini cukup positif. Seperti Yayasan Indonesia Mengajar dan Dompot Dhuafa turut menyumbang tenaga pengajar sukarela. Media sosial pun ramai dengan tagar #SekolahUntukSemua, memperlihatkan antusiasme luas masyarakat terhadap program ini. Kolaborasi lintas aktor ini menjadi elemen penting keberhasilan jangka panjang. (Detik.com, 2025)

Evaluasi awal oleh Kementerian Sosial merumuskan sejumlah langkah strategis, termasuk pelatihan guru komunitas, perluasan lokasi ke wilayah kepulauan, dan integrasi dengan program pelatihan kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Rencana ini memperlihatkan bahwa *Sekolah Rakyat* diarahkan untuk tidak hanya memberikan pendidikan dasar, tetapi juga menyiapkan peserta untuk mandiri secara ekonomi.

Pembahasan

Kebijakan *Sekolah Rakyat* yang diinisiasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada pemerintahan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis dalam mereformasi sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini menjadi titik balik yang menegaskan bahwa pendidikan tidak semata hak konstitusional, tetapi juga instrumen strategis pembangunan manusia berbasis HAM. Fokusnya pada anak-anak marginal menunjukkan pergeseran dari pendekatan birokratis ke pendekatan akar rumput (grassroots), yang lebih peka terhadap kebutuhan sosial dan ketimpangan struktural yang terjadi di lapangan (CNN Indonesia, 2025).

Penerapan program ini dalam praktik menunjukkan bahwa negara mulai hadir dalam ruang-ruang kosong yang selama ini dikuasai oleh ketidakadilan sistemik. Sektor pendidikan yang kerap terpusat dan normatif kini didobrak dengan pendekatan fleksibel dan inklusif. Seperti dijelaskan oleh Yohanes dan Widiyastuti (2022), pendidikan alternatif seperti *Sekolah Rakyat* membuka ruang artikulasi bagi warga negara untuk menjadi subjek yang sadar akan hak-haknya, bukan sekadar penerima bantuan.

Kebijakan ini mengakomodasi prinsip-prinsip dalam *Education for All* dan Konvensi Hak Anak, yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dan relevan tanpa diskriminasi. Dalam pelaksanaannya, *Sekolah Rakyat* menargetkan kelompok-kelompok yang sebelumnya sulit terjangkau oleh pendidikan formal seperti anak jalanan, pekerja anak, dan anak dari keluarga miskin ekstrem (Kompas.com, 2025). Pendekatan ini mempertegas bahwa pendidikan harus dimaknai sebagai bentuk keadilan distributif, bukan sekadar peningkatan angka partisipasi.

Dalam dimensi pedagogis, pendekatan kurikulum *Sekolah Rakyat* yang berbasis kontekstual menjadi kekuatan utama. Metode belajar bersifat partisipatif, berpusat pada pengalaman dan kebutuhan lokal. Hal ini relevan dengan teori pendidikan kritis yang diperkenalkan oleh Paulo Freire, di mana pendidikan harus membebaskan dan menumbuhkan kesadaran kritis. Menurut Wahyudi & Latif (2023), pembelajaran berbasis pengalaman sosial lokal memiliki kekuatan membentuk karakter dan empati sosial yang tidak dimiliki oleh pendidikan formal konvensional. Keberhasilan awal *Sekolah Rakyat* tidak lepas dari keterlibatan komunitas. Dalam program ini, relawan, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal bukan hanya pelengkap, tetapi pilar utama pelaksanaan. Mereka berperan sebagai fasilitator, mediator, dan pelindung sosial bagi anak-anak peserta.

Penguatan partisipasi lokal ini juga mencerminkan praktik *community-based education*, yang dinilai lebih adaptif dan efisien dalam menjangkau kelompok marjinal. Menurut Jannah, dkk (2021), pendidikan berbasis komunitas memiliki efektivitas tinggi dalam pembentukan identitas, nilai sosial, dan keterampilan hidup, yang kesemuanya penting dalam konteks pembangunan SDM jangka panjang.

Selain dampak kuantitatif, Sekolah Rakyat juga memiliki dampak kualitatif dalam pembentukan nilai dan karakter. Modul ajar yang dirancang Kemensos mengangkat isu seperti keadilan sosial, anti-diskriminasi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Hal ini menjadi nilai tambah penting karena sebagian besar sistem pendidikan formal belum sepenuhnya menyentuh aspek-aspek nilai sosial ini dalam pembelajaran sehari-hari.

Tantangan lain yang menonjol adalah ketidakseimbangan pelaksanaan antara wilayah urban dan rural. *Sekolah Rakyat* di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua menghadapi hambatan logistik yang serius. Kompas.com (2025) melaporkan bahwa pengiriman bahan ajar dan supervisi kegiatan pendidikan di daerah perbatasan masih terkendala infrastruktur dan koordinasi kelembagaan.

Dari sisi regulasi, keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025, yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin menjadi kerangka hukum penting dalam memperjelas peran dan tanggung jawab aktor terkait. Namun, regulasi ini masih memerlukan turunan teknis berupa petunjuk pelaksanaan dan evaluasi berbasis indikator. Hal ini penting agar program dapat diukur dan diperbaiki secara berkelanjutan.

Secara sosiologis, Sekolah Rakyat juga menjadi ruang interaksi sosial yang memperkuat modal sosial komunitas. Nilai gotong royong, kepercayaan, dan kerja sama meningkat seiring keterlibatan warga dalam kegiatan pendidikan. Hal ini sejalan dengan teori Pierre Bourdieu tentang *social capital* sebagai faktor penting dalam pengembangan komunitas berdaya.

Salah satu poin penting dalam penguatan SDM adalah bahwa *Sekolah Rakyat* juga membekali peserta dengan keterampilan hidup (*life skills*) seperti literasi keuangan dasar, kesehatan lingkungan, dan keterampilan kewirausahaan mikro. Program ini memiliki dampak langsung terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga dan kesiapan anak dalam menghadapi kehidupan sosial pasca-program (Safitri, dkk. 2022).

Kurikulum *Sekolah Rakyat* juga memberi ruang untuk penguatan nilai-nilai kultural lokal seperti adat, bahasa daerah, dan cerita rakyat. Integrasi ini tidak hanya membentuk identitas kebangsaan yang kokoh, tetapi juga memperkuat relasi antargenerasi. Jurnal Pancasila oleh Yohanes & Widiyastuti (2022) menekankan pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan karakter bangsa.

Pendekatan HAM dalam Sekolah Rakyat ditunjukkan dalam sistem rekrutmen tanpa diskriminasi. Anak dari latar belakang apapun berhak mendapatkan pendidikan, terlepas dari status sosial, agama, dan kemampuan fisik. Hal ini mencerminkan prinsip inklusi sejati yang masih belum banyak diterapkan dalam sistem pendidikan nasional.

Jika dikembangkan secara berkelanjutan, program ini berpotensi menjadi *policy model* bagi sistem pendidikan nonformal nasional. Terutama dalam konteks pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 10 (Pengurangan Kesenjangan), *Sekolah Rakyat* menunjukkan relevansi tinggi karena menysasar langsung populasi yang paling rentan.

Secara konseptual, Sekolah Rakyat dapat dikembangkan menjadi sistem paralel yang mengisi celah yang tidak mampu dijangkau sistem formal. Melalui pelatihan pengajar komunitas, penguatan jejaring sosial, serta integrasi dengan program pelatihan kerja, program ini dapat menciptakan jalur pendidikan alternatif yang bermartabat dan mandiri.

Pembelajaran dari *Sekolah Rakyat* menunjukkan bahwa pendidikan yang bersandar pada solidaritas sosial dan pemberdayaan komunitas dapat menghasilkan dampak transformatif yang luas. Oleh karena itu, *Sekolah Rakyat* harus dipertahankan sebagai kebijakan publik jangka panjang, bukan hanya respons sesaat terhadap krisis pendidikan.

Sebagai penutup pembahasan, penting ditegaskan bahwa *Sekolah Rakyat* bukan hanya solusi teknokratis, tetapi merupakan gerakan sosial yang menggabungkan kekuatan negara, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam satu kesatuan visi: mewujudkan kesetaraan HAM melalui pendidikan yang bermakna, kontekstual, dan membebaskan.

KESIMPULAN

Program Sekolah Rakyat merupakan terobosan kebijakan strategis dalam upaya negara mengatasi ketimpangan pendidikan yang struktural, khususnya bagi kelompok marjinal. Berbasis pendekatan komunitas dan prinsip inklusivitas, Sekolah Rakyat tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga membangun kesadaran HAM dan solidaritas sosial di tingkat akar rumput. Kurikulum yang menekankan nilai keadilan sosial, empati, serta pemberdayaan ekonomi melalui life skills, memperlihatkan bahwa pendidikan dapat menjadi instrumen transformatif dalam pembangunan SDM yang unggul.

Secara teoritis, artikel ini menegaskan urgensi *pendidikan emansipatoris berbasis komunitas* sebagai paradigma alternatif terhadap model pendidikan konvensional yang elitis. Hal ini menguatkan argumen dalam teori pendidikan kritis (Paulo Freire) bahwa proses belajar harus berakar pada konteks sosial peserta didik untuk menghasilkan kesadaran transformatif. Dari segi kebijakan, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi blueprint sistem pendidikan nonformal nasional yang mendukung pencapaian SDG 4 dan SDG 10. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan Sekolah Rakyat ke dalam *kerangka kebijakan pendidikan nasional secara eksplisit*, termasuk penetapan indikator kinerja, alokasi anggaran khusus, dan regulasi turunan yang mengatur tata kelola, akuntabilitas, dan keberlanjutan program.

SARAN

Pemerintah perlu memberikan dukungan logistik dan fasilitas yang memadai, termasuk pelatihan intensif bagi tenaga pengajar lokal agar pelaksanaan program lebih optimal, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Pemerintah juga perlu melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta agar bisa memperkuat keberlanjutan program serta memperluas cakupan dan dampaknya.

Sekolah Rakyat harus terhubung dengan program pelatihan kerja dan kewirausahaan agar lulusan tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga memiliki akses terhadap kemandirian ekonomi. Modul pembelajaran juga sebaiknya terus mengakomodasi kearifan lokal dan nilai-nilai budaya daerah untuk membangun karakter serta memperkuat identitas nasional.

Untuk memperkuat validitas empiris dan pengayaan perspektif lapangan, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan studi kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pengelola, fasilitator, dan peserta Sekolah Rakyat di berbagai wilayah. Eksplorasi lapangan ini penting untuk memahami dinamika lokal, tantangan implementasi, serta inovasi yang berkembang secara partisipatif, yang tidak dapat sepenuhnya diungkap melalui studi literatur semata.

DAFTAR REFERENSI

- CNN Indonesia. (2025, Januari 20). *Kemensos Luncurkan Sekolah Rakyat: Akses Pendidikan untuk Semua*. <https://www.cnnindonesia.com>
- Detik.com. (2025, Januari 25). *Tagar #SekolahUntukSemua Viral, Masyarakat Dukung Program Sekolah Rakyat*. <https://www.detik.com>
- Ferizaldi, F., & Fazlina, F. (2020). Implementasi program pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 1(2), 110-122. <https://www.neliti.com/publications/339166>
- Jannah, A. M., Setiyowati, A., Lathif, K. H., & Devi, N. D. (2021). Model layanan pendidikan inklusif di Indonesia. *Semantic Scholar*. <https://pdfs.semanticscholar.org/e3c8/b8094467b1de205d34aee540b8b60b007d75.pdf>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025, April 9). *Inpres No 8 Tahun 2025 Terbit, Sekolah Rakyat Jadi Instrumen Penting Tekan Kemiskinan Ekstrem*. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/Inpres-No-8-Tahun-2025-Terbit,-Sekolah-Rakyat-Jadi-Instrumen-Penting-Tekan-Kemiskinan-Ekstrem>

- Kompas.com. (2025, Februari 3). *Sekolah Rakyat Jadi Solusi Pemerintah Kurangi Anak Tidak Sekolah di Kawasan Miskin*. <https://www.kompas.com>
- Kompas.com. (2025, Februari 15). *Prabowo Luncurkan Sekolah Rakyat untuk Pendidikan Inklusif Berbasis Komunitas*. <https://www.kompas.com>
- Marlinah, L. (2019). Pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak SDM yang berjiwa inovator dan technopreneur menyongsong era society 5.0. *Ikraith-Ekonomika*, 2(1), 42-53. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/download/647/488>
- Putri, D. E., & SE, M. M. (2020). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam: Pendidikan Inklusif dan Diversitas*. Penerbit Eureka. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/589984-manajemen-lembaga-pendidikan-islam-pende-8c2ab3bb.pdf#page=41>
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia: Analisis pencapaian SDGs. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6201-6212. <https://www.neliti.com/publications/448758>
- Simorangkir, M. R. R. (2022). *Orientasi Baru Pedagogi Abad 21*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia. <http://repository.uki.ac.id/8968/1/OrientasiBaruPedagogiAbab21.pdf>
- Tempo.co. (2025, Februari 14). *Tantangan Sekolah Rakyat di Wilayah Terpencil: Minim Fasilitas, Guru Terbatas*. <https://www.tempo.com>
- Wahyudi, F., & Latif, A. (2023). Pendidikan inklusif di Indonesia perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Disability Studies and Rehabilitation*, 2(1), 88-97. <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jdsr/article/view/2102>
- Yohana, P. C. (2023). Implementasi pendidikan inklusif dalam meningkatkan kesamaan hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 11(2), 122-133. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/2194>
- Yohanes, T., & Widiyastuti, Y. S. M. (2022). Kajian ideologis Pancasila terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan dan Pembangunan Karakter*, 3(1), 49-62. <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/82>